

BAB II

RODRIGO DUTERTE DIANTARA KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* DAN KETEGANGAN DENGAN UNI EROPA

2.1 Dinamika Kepemimpinan Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte merupakan presiden resmi ke 16 Filipina setelah memenangkan pemilu pada tahun 2016 lalu, kemenangan dari Duterte ini sendiri sempat menjadi perbincangan pada tahun tersebut lantaran pemilu tersebut di ikuti oleh naman ama besar yang turut mengikuti pemilu tersebut, di antaranya ada Manuel “Mar” Roxas II yakni mantan menteri dalam negri yang merupakan mantan menteri dalam negri yang berasal dari partai Liberal Filipina dan merupakan salah satu kandidat kuat yang di gadang gadang menjadi presiden pada periode berikutnya³⁰, kandidat kedua yakni Grace Poe yang merupakan seorang senator independen serta merupakan anak angkat dari aktor terkenal asal Filipina yakni Fernando Poe Junior, selanjutnya ada Jejomar Binay, yang merupakan wakil presiden dari presiden sebelumnya yakni Benigno Aquino III yang mengajukan diri sebagai presiden, calon yang terakhir yakni Miriam Defensor Santiago yang merupakan senator dan mantan hakim yang maju ke pemilihan umum dengan mendapat dukungan dari *People’s Reform Party*.

³⁰ The Summit Express, “PNoy, LP Officially Endorse Mar Roxas for President in 2016 Elections,” 2015, <https://www.thesummitexpress.com/2015/07/pnoy-lp-officially-endorse-mar-roxas-for-president-in-2016-elections.html>.

Dengan kemenangan Duterte pada pemilu 2016 menambah pengalaman Duterte dalam dunia perpolitikan dalam skala nasional. Kemenangan dari Duterte sendiri sudah banyak di perbincangkan dan banyak di prediksi akan menjadi presiden Filipina yang selanjutnya, kemenangan dari Duterte ini juga menjadi salah satu pesan tersirat pada pemimpin sebelumnya yakni Benigno Aquino III bahwa kemenangan ini merupakan salah satu bentuk protes dari mayoritas Masyarakat Filipina terhadap kepemimpinan Benigno Aquino III atau yang kerap di sebut “Noynoy ” tersebut³¹.

Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, yang menjabat dari tahun 2016 hingga 2022, dikenal dengan pendekatan yang kontroversial dan penuh dinamika, terutama terkait dengan kebijakan “*War On Drugs*” yang menjadi sorotan pemerintahannya. Duterte muncul sebagai figur populis yang menjanjikan perubahan drastis dan penegakan hukum yang tegas, terutama dalam memberantas kejahatan narkoba yang dianggap sebagai masalah utama di Filipina. Salah satu aspek paling menonjol dari kepemimpinan Duterte adalah perang narkoba yang dilancarkannya secara agresif.. Pemerintah Duterte mengklaim bahwa tindakan keras ini diperlukan untuk mengamankan negara dari ancaman narkoba dan kejahatan terkait, namun banyak pihak menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan pelanggaran serius, termasuk pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*)³².

³¹ Departement Of International Relations University of Islam Indonesia, “Duterte Dan Warisan Kekerasan,” 2022, <https://ir.uui.ac.id/publikasi/duterte-dan-warisan-kekerasan/>.

³² *Ibid.*

Kepemimpinan Duterte juga ditandai dengan upaya memperkuat posisi Filipina di kancah internasional, meskipun sering kali menimbulkan kontroversi. Ia mengambil sikap yang terkadang bertentangan dengan kebijakan negara-negara Barat, terutama terkait dengan kritik atas pelanggaran HAM dalam perang narkoba. Duterte bahkan menyatakan bahwa ia tidak akan pernah diadili oleh pengadilan internasional, merujuk pada penyelidikan oleh *International Criminal Court* (ICC) atas dugaan kejahatan kemanusiaan selama masa pemerintahannya. Selain itu, Duterte memanfaatkan isu keamanan nasional dan perang melawan komunisme sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaannya. Melalui pembentukan *National Task Force to End Local Communist Armed Conflict* (NTF-ELCAC), pemerintahannya menggabungkan perang narkoba dengan kampanye anti-komunis yang juga digunakan untuk menekan oposisi politik dan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara³³.

2.1.1 Kebijakan *War On Drugs*

Project Double Barrel adalah kebijakan operasional utama yang diluncurkan oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP) pada awal masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte sebagai bagian dari implementasi program nasional *War On Drugs*. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab perintah presiden dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara masif dalam enam bulan pertama masa jabatannya. Melalui Command Memorandum Circular No. 16-2016, Project Double Barrel dijalankan dengan pendekatan dua arah atau “*double barrel*”, yang

³³ Ibid.

mencerminkan strategi penindakan terhadap pelaku narkoba di berbagai tingkatan. Pendekatan ini membagi sasaran menjadi dua kategori besar: tingkat komunitas dan tingkat jaringan besar. Struktur kebijakan ini disusun secara sistematis dan dijalankan secara serentak di seluruh wilayah Filipina dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, dan menjadi fondasi pelaksanaan kebijakan antinarkotika Duterte di lapangan³⁴.

Project Tokhang adalah bagian dari kebijakan *War On Drugs* di Filipina yang diterapkan oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP) berdasarkan *Command Memorandum Circular No. 16-2016*. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengidentifikasi dan membujuk orang-orang yang dicurigai sebagai pengguna atau pengedar narkoba di tingkat komunitas agar menyerahkan diri secara sukarela atau berhenti dari aktivitas ilegal mereka. Prosedur pelaksanaannya dimulai dengan tahap pengumpulan dan validasi informasi terhadap individu yang terindikasi terlibat narkoba, yang dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga seperti PDEA, NBI, LGU, dan BADAC. Setelah data terkumpul, polisi melakukan koordinasi dengan berbagai pihak³⁵, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga rehabilitasi, dan media, untuk menjamin transparansi dan dukungan operasional. Selanjutnya, dilakukan kunjungan rumah ke rumah secara langsung, di mana polisi datang bersama tokoh masyarakat atau petugas desa

³⁴ Republic of the Philippines, "National Police Commission National Headquarters Philippine National Police Office of The Chief, PNP," *Command Memorandum Circular No. 16 - 2016*, 2016.

³⁵ Ibid.

(barangay tanod) untuk membujuk tersangka agar menyerah atau mengikuti program rehabilitasi. Jika individu bersedia menyerahkan diri, mereka diwajibkan mengisi formulir penyerahan sukarela dan didokumentasikan secara hukum. Namun, apabila tersangka menolak atau tidak ditemukan di tempat, maka akan dilanjutkan dengan proses investigasi oleh unit anti-narkoba. Program ini diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas tindakan, dan bila aktivitas narkoba masih berlangsung di area tersebut, tindakan hukum akan segera diambil. Seluruh proses diharapkan berjalan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan sesuai dengan hukum yang berlaku³⁶.

Project HVT (*High-Value Targets*) adalah komponen kedua dari strategi “Project Double Barrel” dalam kebijakan *War On Drugs* yang diluncurkan oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP) di masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Berbeda dengan *Project Tokhang* yang menasar pelaku narkoba di tingkat komunitas, Project HVT berfokus pada penindakan terhadap tokoh-tokoh besar dalam jaringan peredaran narkoba, termasuk bandar, produsen, pengedar kelas atas, serta kelompok sindikat narkoba baik lokal maupun transnasional.

Pelaksanaan Project HVT dilakukan oleh tim khusus (focus teams) yang terdiri dari penyidik, petugas intelijen, dan personel taktis dari unit-unit dukungan nasional seperti AIDG (Anti-Illegal Drugs Group), RAIDSOTG (Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group), dan unit

³⁶ Ibid.

sejenis di tingkat provinsi, kota, hingga stasiun. Operasi HVT dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat nasional (oleh AIDG) untuk memburu pelaku lintas negara, regional (RAIDSOTG) untuk pelaku lintas provinsi, hingga lokal (PAIDSOTG, DAIDSOTG, CAIDSOTG, dan SAIDSOTG) yang menangani pengedar besar di tingkat kota atau kabupaten³⁷.

Strategi ini mencakup berbagai metode, seperti penyelidikan intensif, pengumpulan data intelijen, penggerebekan rahasia, hingga operasi penyergapan terhadap pelaku narkoba bersenjata. Fokus utama adalah memutus rantai distribusi dan logistik narkoba dari hulu ke hilir, termasuk memetakan struktur organisasi sindikat, sumber dana, jalur suplai, serta jaringan perlindungan politik atau aparat. Selain itu, Project HVT juga disertai dengan strategi internal cleansing, yakni pembersihan anggota polisi yang terlibat sebagai pelindung atau kaki tangan jaringan narkoba.

Philippine Drug Enforcement Agency atau PDEA dalam laporannya menyebutkan bahwa dari awal kebijakan *War On Drugs* di implementasikan, dari periode 1 Juli 2006 hingga 31 Juli 2018 setidaknya terdapat 105.658 kasus operasi anti narkoba dengan cara turun langsung ke lapangan, lalu kemudian sebanyak 152.123 penangkapan terjadi pada selang waktu tersebut. Angka ini menjadi angka tertinggi penangkapan dan pelaksanaan operasi anti narkotika sejak di implementasikannya kebijakan *War On Drugs* ³⁸. Pada sepanjang operasi tersebut setidaknya PDEA dapat menyita sebanyak 2 Ton

³⁷ Ibid.

³⁸ Meidika Nur Sasmito, "Analisis Isi Dalam Regulasi Narkoba Di Filipina Tahun 2016 – 2018," March 1, 2019, Hal 34

lebih narkotika jenis Shabu dengan estimasi nilai jual sebanyak 14 Miliar Peso. Dalam 2 tahun pengimplementasian kebijakan *War On Drugs*, *Philippine National Police* atau PNP memaparkan bahwa setidaknya terdapat 22.983 kasus pembunuhan, pembunuhan ini sendiri sebagian besar termasuk pembunuhan dengan kematian yang masih diselidiki atau *Deaths Under Inquiry* atau DUI. PNP menyatakan terdapat setidaknya 33 kasus kematian setiap harinya, dari tanggal 1 Juli 2016 Hingga 21 Mei 2018.

Shabu sendiri merupakan salah satu jenis Narkotika yang populer di gunakan di kalangan pecandu di Filipina, hal ini di buktikan dengan adanya laporan yang di himpun melalui survei dari *Dangerous Drugs Board* di tahun 2016 silam, yang menunjukan bahwa penggunaan shabu di Filiipina mencapai angka yang mengkhawatirkan yakni sebanyak 860 ribu jiwa³⁹. Namun ketua PDEA Vilanueva menjelaskan bahwa jumlah dari pengguna sabu di Filipina lebih dari angka yang di sebutkan oleh DDB, yakni sebanyak lebih dari 1,3 Juta jiwa, dan bahkan jumlah tersebut bisa lebih banyak dari perkiraan angka tersrsebut. Vilanueva sendiri menjelaskan bahwa data tersebut di dapat dengan mengolah data yang ada berdasarkan data fasilitas rehabilitasi yang ada di Filipina tersebut menjelaskan bahwa 75 persen dari pasien. dari jumlah 1,3 Juta jiwa lebih tadi yang telah di identifikasi secara resmi, setidaknya ada 700 ribu di antara mereka yang memilih untuk menyerahkan diri pada polisi untuk di lakukan rehabilitasi ketimbang harus

³⁹ Clare Baldwin and Andrew R.C. Marshall, "As Death Toll Mounts, Duterte Deploys Dubious Data in 'War On Drugs,'" reuters investigates, 2016, <https://www.reuters.com/investigates/special-report/philippines-duterte-data/>.

menunggu untuk di tangkap dan memiliki probabilitas untuk meninggal dalam penangkapan.

Dalam perkembangannya perang melawan narkoba ini sendiri selain menangkap warga sebagai pengguna, namun di laporkan bahwa personal otoritas dan pejabat tinggi di dapati menggunakan narkoba. dalam laporan *Real Numbers PH Year 2* dalam kurun waktu 2016-2019 terdapat setidaknya 569 pekerja yang berada di kursi pemerintahan yang di tangkap dalam operasi anti narkoba tersebut⁴⁰, selain itu sebanyak 268 pegawai negeri sipil selain itu ada 243 pejabat pemerintahan dan 58 personil otoritas⁴¹.

Dalam pengimplementasiannya kebijakan *War On Drugs* sendiri mendapat banyak kecaman, baik dari pihak Filipina itu sendiri maupun dari pihak Internasional, Kebijakan “*War On Drugs*” yang diterapkan di Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte telah menimbulkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan ini diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkoba, terutama *methamphetamine hydrochloride* (shabu), yang menjadikan Filipina sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan shabu tertinggi di Asia Timur. Pemerintah Duterte berargumen bahwa tindakan tegas diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan mengurangi kejahatan yang terkait dengan narkoba.

⁴⁰ Meidika Nur Sasmito, *Loc. Cit.* Hal 35

⁴¹ Christopher Lloyd Caliwan, “‘Real Numbers’ on PH Anti-Drug Campaign Accurate: PDEA | Philippine News Agency,” *Philippine News Agency*, 2020, <https://www.pna.gov.ph/articles/1124814>.

Salah satu dampak paling mencolok dari kebijakan ini adalah meningkatnya jumlah kasus pembunuhan di luar proses hukum (*Extrajudicial killings*). Laporan menunjukkan bahwa angka kematian akibat kebijakan ini berkisar antara 6.215 hingga 30.000 orang, dengan banyak korban adalah pengguna narkoba, pengedar, dan individu yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas narkoba. Tindakan kekerasan ini sering kali dilakukan oleh aparat kepolisian dan kelompok bersenjata, yang beroperasi dengan impunitas. Meskipun mendapat kecaman internasional, termasuk dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Amnesty International, pemerintah Filipina tetap mempertahankan kebijakan ini dengan alasan bahwa keamanan nasional lebih penting daripada tekanan dari luar⁴². Mereka berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Dalam survei yang dilakukan, beberapa warga Filipina melaporkan merasa lebih aman setelah penerapan kebijakan ini, meskipun dengan biaya yang sangat tinggi dalam hal nyawa manusia dan pelanggaran hak asasi.⁴³

Pemerintah Filipina juga menunjukkan sikap defensif terhadap pengawasan internasional, menekankan hak mereka untuk mengatur urusan domestik tanpa campur tangan asing. Filipina bahkan keluar dari ICC sebagai langkah untuk melindungi kepentingan nasionalnya, menunjukkan komitmen

⁴² Armed conflict location & event data project, "The Drug War Rages on in the Philippines : New Data on the Civilian Toll, State Responsibility, and Shifting Geographies of Violence," no. 2021 (2021).

⁴³ I Gusti Ngurah Aristya P, Putu Titah Kawitri R, and Penny Kurnia P, "Analisis Keamanan Nasional Atas Kebijakan *War On Drugs*," *Online) DIKSHI* 3, no. 1 (2023): Hal 1-8

pemerintah untuk melanjutkan kebijakan ini meskipun ada risiko isolasi internasional. Secara keseluruhan, kebijakan “*War On Drugs*” di Filipina mencerminkan dilemma antara keamanan nasional dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini diperlukan untuk melindungi masyarakat, banyak pihak berpendapat bahwa metode yang digunakan tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.⁴⁴

Tindakan ini dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Pasal 7 Statuta Roma, yang mengatur tentang kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Meskipun Filipina telah menarik diri dari ICC, yurisdiksi ICC tetap berlaku untuk penyelidikan atas tindakan yang terjadi sebelum penarikan tersebut, sesuai dengan Pasal 127 Statuta Roma. Oleh karena itu, tindakan Extrajudicial killings yang terjadi dalam konteks kebijakan “*War On Drugs*” dapat diadili oleh ICC sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, mengingat bahwa tindakan tersebut memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam Statuta Roma. Secara keseluruhan, kebijakan ini tidak hanya melanggar hukum domestik tetapi juga hukum internasional, dan tindakan tersebut dapat diadili oleh ICC, yang menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia di tingkat global⁴⁵.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Aisyah Muthmainnah, “*Extrajudicial Killing Dalam Kebijakan War On Drugs Di Republic of Philippines: Melanggar Statuta Roma?*,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 4, no. 1 (2023): 146–64, <https://doi.org/10.22437/up.v4i1.20028>.

2.1.2 Pelanggaran Ham Atas Kebijakan *War On Drugs*

Tidak dapat di pungkiri bahwa kebijakan *War On Drugs* memakan banyak korban akibat *Extrajudicial Killing* yang terjadi. Tom Lantos, salah satu pejabat di *Human Right Watch* yang merupakan salah satu korban selamat dari peristiwa *Holocaust* menyampaikan bahwa *Human Right Watch* mengecam dan menolak di lanjutkannya kebijakan *War On Drugs*, penolakan ini sendiri sudah terjadi sejak tahun 2017 yang notabene merupakan awal dari pengimplementasian kebijakan *War On Drugs* ini. Lebih lanjut *Human Right Watch* melalui Tom Lantos menyatakan beberapa kecaman terhadap beberapa kasus yang terjadi sepanjang awal tahun 2017 yakni yang pertama adanya tindakan kekerasan hingga pembunuhan di luar hukum yang tentunya perbuatan ini masuk ke dalam pelanggaran HAM berat, di tambah banyaknya tuduhan atas individu individu yang sebenarnya tidak terlibat kedalam perdagangan ataupun penggunaan Narkotika menjadi korban dari tuduhan tak berdasar. Kedua *Human Right Watch* melayangkan kritik atas adanya impunitas yang terjadi di Filipina, *Human Right Watch* menyatakan bahwa banyak terdapat kasus pelanggaran HAM yang ternyata tidak di usut secara tuntas di Filipina. Polisi serta aparat yang berwenang yang terindikasi melakukan tindak kejahatan ini sendiri tidak menjalani hukuman atas tindakan yang mereka telah lakukan terhadap Korban korban tersebut⁴⁶.

Ketiga yakni adanya penangkapan serta intimidasi terhadap kritikus kebijakan *War On Drugs*, *Human Right Watch* sendiri menyatakan bahwa

⁴⁶ Brown, "The Human Rights Consequences of the *War On Drugs* in the Philippines."

pemerintahan Duterte seakan menargetkan para oposisi yang tidak sejalan dan sepemikiran terkait kebijakan *War On Drugs*, elemen elemen seperti aktivis, jurnalis dan kritikus atas kebijakan ini seakan di buru lalu kemudian di tangkap dan di intimidasi⁴⁷. Penangkapan ini sendiri memiliki tujuan untuk membungkam suara yang menentang kebijakan pemerintah, secara tidak langsung Duterte telah menciptakan ketakutan akan menjadi oposisi pemerintahnya serta menciptakan suasana pembungkaman kebebasan berekspresi terhadap pengkritik pemerintahnya.

Selama pengimplementasian kebijakan *War On Drugs* sendiri terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat selama kurun waktu 2017 hingga 2021 di antaranya yakni :

1. *Nanlaban*

Nanlaban adalah sebuah narasi yang sering digunakan oleh aparat kepolisian Filipina untuk membenarkan kematian yang terjadi selama operasi terkait perang narkoba. Istilah "*nanlaban*" secara harfiah berarti "melawan" atau "berjuang kembali," dan dalam konteks ini, narasi tersebut menyatakan bahwa korban yang tewas dalam operasi polisi dianggap telah melakukan perlawanan atau perlawanan bersenjata terhadap petugas saat hendak ditangkap. Oleh karena itu, polisi mengklaim bahwa tindakan mereka untuk menembak korban adalah sebagai bentuk pembelaan diri yang sah, sehingga kematian

⁴⁷ Carlos H Conde, "Duterte Vows More Bloodshed in Philippine 'Drug War,'" Human Rights Watch, 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/07/23/duterte-vows-more-bloodshed-philippine-drug-war>.

tersebut dianggap sebagai akibat dari bentrokan yang tidak dapat dihindari.

Namun, narasi nanlaban ini sering kali dipertanyakan dan dianggap sebagai pola yang digunakan secara sistematis untuk menutupi pembunuhan di luar proses hukum. Banyak laporan menunjukkan bahwa korban yang diklaim "melawan" ini sebenarnya tidak selalu bersenjata atau melakukan perlawanan. Beberapa korban ditemukan dengan luka tembak di bagian belakang tubuh atau di tangan, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin sedang berusaha melindungi diri atau bahkan tidak berdaya saat ditembak⁴⁸.

2. *Extrajudicial killing*

Extrajudicial killing selama penerapan kebijakan *War On Drugs* di Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte merupakan tindakan pembunuhan tanpa proses hukum yang sah, yang dilakukan secara sistematis terhadap tersangka pengguna dan pengedar narkoba. Kebijakan ini dimulai sejak 2016 dengan pendekatan keras yang mengizinkan aparat keamanan maupun warga sipil untuk menindak tegas para pelaku narkoba, bahkan tanpa melalui proses peradilan yang adil. Ribuan orang tewas dalam operasi ini, termasuk mereka yang telah menyerahkan diri, yang menimbulkan kecaman luas dari komunitas internasional karena dianggap melanggar hak asasi

⁴⁸ *Armed conflict location & event data project (2021)*, "The Drug War Rages on in the Philippines : New Data on the Civilian Toll, State Responsibility, and Shifting Geographies of Violence." Hal 8-9.

manusia dan prinsip hukum internasional⁴⁹. Sebagai respons terhadap penyelidikan oleh *International Criminal Court* (ICC) terkait dugaan kejahatan kemanusiaan, Filipina mengumumkan dan kemudian resmi keluar dari ICC pada 2018-2019, sebuah langkah yang menimbulkan kontroversi dan kritik baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan ini mencerminkan idiosinkratik kepemimpinan Duterte yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai prioritas utama dengan cara yang kontroversial dan penuh kekerasan, meskipun menimbulkan perpecahan sosial dan pelanggaran HAM yang serius⁵⁰.

3. Rekayasa Tempat Kejadian Perkara

Rekayasa TKP ini merujuk pada praktik di mana senjata atau barang bukti lain sengaja ditanam di lokasi kejadian setelah korban tewas dengan kata lain merekayasa tempat kejadian perkara yang sebelumnya, dengan tujuan untuk menciptakan kesan bahwa korban memang bersenjata dan melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian. Praktik ini menjadi bagian dari pola yang lebih luas dalam membenarkan kematian yang terjadi selama operasi anti-narkoba, yang sering kali diklaim sebagai akibat dari korban yang "melawan" atau nanlaban.

Secara detail, rekayasa TKP ini melibatkan beberapa modus operandi yang merugikan keadilan dan hak asasi manusia. Pertama,

⁴⁹ Agung Perkasa. Op. Cit. Hal 2-9

⁵⁰ *Ibid.* Hal 5

korban yang tewas sering ditemukan dengan luka tembak yang tidak konsisten dengan narasi perlawanan bersenjata. Misalnya, banyak korban ditemukan dengan luka tembak di bagian belakang tubuh atau di tangan, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin sedang berusaha melindungi diri atau bahkan tidak berdaya saat ditembak. Luka-luka ini bertentangan dengan klaim bahwa korban melakukan serangan aktif terhadap polisi. Kedua, senjata yang ditemukan di dekat korban sering kali diduga bukan milik korban atau bahkan tidak pernah digunakan oleh mereka. Senjata tersebut diduga sengaja diletakkan oleh aparat atau pihak lain yang terlibat untuk memperkuat narasi bahwa korban memang berbahaya dan melakukan perlawanan.⁵¹

4. *Bounty Hunter*

Sistem *Bounty Hunter* adalah praktik di mana aparat keamanan, seperti polisi, menerima imbalan finansial untuk setiap orang yang mereka bunuh, terutama dalam konteks perang melawan narkoba di Filipina. Praktik ini menciptakan apa yang dikenal sebagai "*The Economy murder*" di mana insentif finansial mendorong polisi untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus *Extrajudicial killing* dan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penegakan hukum.

⁵¹ *Ibid.*, Hal 9

Dalam konteks ini, polisi sering kali lebih termotivasi untuk membunuh daripada menangkap tersangka, karena mereka mendapatkan imbalan langsung untuk setiap kematian. Ini menciptakan situasi di mana tindakan kekerasan menjadi lebih umum dan dianggap sebagai cara yang sah untuk menangani masalah narkoba. Laporan menunjukkan bahwa banyak dari pembunuhan ini tidak melalui proses hukum yang benar, dan sering kali tidak ada pertanggungjawaban bagi para pelaku. Praktik ini juga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, di mana polisi dapat membunuh individu tanpa alasan yang sah, hanya untuk mendapatkan imbalan finansial.⁵²

2.2 Ketegangan Antara Filipina dan Uni Eropa

Filipina dan Uni Eropa telah menjalin hubungan kerjasama sejak lama, tercatat hubungan pertama antara Filipina dan Uni Eropa dimulai pada tahun 1952 ketika Filipina dan Rumania mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik, dan pada 12 Mei tahun 1964⁵³, Filipina menjalin hubungan dengan *European Economic Community* (EEC), yang kemudian menjadi bagian dari Uni Eropa melalui Perjanjian *Maastricht*. Filipina sendiri memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan dengan EEC sebagai salah satu pendiri ASEAN⁵⁴.

⁵² *Ibid.*, Hal 8

⁵³ Pizaro Gozali Idrus, "Filipina, Uni Eropa Tingkatkan Kerja Sama Berbagai Bidang," Anadolu Agency Indonesia, 2021, <https://www.aa.com.tr/id/regional/filipina-uni-eropa-tingkatkan-kerja-sama-berbagai-bidang/2141195>.

⁵⁴ Dan Vataman, "The Establishment And Development Of Diplomatic Relations And Partnership Between European Union And The Philippines," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 1 (2023): 339–47, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i1.599>.

Hubungan antara Filipina dan Uni Eropa sendiri sudah terjalin sangat lama dan dapat di bilang memiliki hubungan yang saling menguntungkan, dari tahun ke tahun Filipina yang menyandang sebagai salah satu negara pendiri ASEAN ini juga mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Uni Eropa⁵⁵, namun dengan terimplementasinya kebijakan pemberantasan narkoba *War On Drugs* pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte dan dengan fakta bahwa kebijakan tersebut membawa korban jiwa yang sangat tinggi dan banyaknya serentetan pelanggaran HAM yang terjadi kebijakan tersebut telah memicu ketegangan antara Filipina dan Uni Eropa, kemudian Uni Eropa melalui perwakilan khusus dari Uni Eropa pada urusan Hak Asasi Manusia Eamon Gilmore menyatakan bahwa Pelanggaran Ham yang di lakukan oleh aparat atau Polisi di Filipina sangat berbahaya, meskipun beberapa dari aparat tersebut telah di hukum namun hukuman tersebut kurang bisa memberikan efek jera kepada mereka. Dengan seiring kebijakan *War On Drugs* yang terus di lakukan, maka hal ini tentunya tidak cukup untuk meyakinkan pihak Uni Eropa untuk terus melanjutkan perdagangan (*Generalized Scheme of Preferences Plus*) dengan Uni Eropa⁵⁶. Hukuman yang di berikan pada Polisi yang melakukan *Extrajudicial Killing* atau pembunuhan tanpa melalui proses hukum ini sangat sedikit jika di dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada, dari 2016 Kebijakan *War On Drugs* ini aktif di lakukan, dan lebih dari 6.000 kematian yang

⁵⁵ *Ibid.*, Hal 3

⁵⁶ Conde., *Op. Cit*

di akui oleh pihak kepolisian hanya segelintir kasus saja yang benar benar di bawa ke meja peradilan,⁵⁷.

Gilmore juga menambahkan bahwa jika ingin tetap masuk kedalam skema GSP+ , suatu negara harus meratifikasi 27 konvensi internasional dan mematuhi ke 27 konvensi tersebut, konvensi konvensi tersebut mencakup Hak Asasi Manusia, Hak Buruh, Perlindungan Buruh serta konvensi mengenai tata kelola yang baik, Sedangkan Filipina sendiri secara jelas melanggar konvensi yang di ratifikasinya dengan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat atas kebijakan *War On Drugs* . Meskipun pada tahun 2020 Filipina masih menikmati skema *GSP+* Ini namun Uni Eropa mendesak agar Filipina merespon secara serius atas apa yang di peringatkan oleh Uni Eropa terkait pelanggaran Ham yang berat atas kebijakan *War On Drugs* agar keberlangsungan kerjasama tetap berjalan dan Filipina tidak perlu menanggung hukuman yang akan di berikan pihak internasional kepada Filipina⁵⁸.

Di Tengah ketegangan antara Uni Eropa dan Filipina yang terjadi akibat kebijakan *War On Drugs* Filipina dengan berani keluar dari *ICC Court*. Pada masa kepemimpinan Benigno Aquino III *Republic Act No. 9851* menjadi landasan utama untuk bergabung atau meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2011 silam, kemudian Benigno Aquino III sendiri berulang kali mengatakan bahwa dengan di ratifikasinya *Republic Act No. 9851* menandai awal dari perlawanan terhadap Impunitas yang terjadi di Filipina sekaligus menjadi pelengkap atas peraturan

⁵⁷ Jomar Canlas, "DoJ to Review 250 Drug War Cases," The Manila Times, 2022, <https://www.manilatimes.net/2022/03/03/news/national/doj-to-review-250-drug-war-cases/1834949>.

⁵⁸ *Ibid.*

domestik nasional di Filipina dalam menangani pelanggaran pelanggaran yang serius⁵⁹. Kemudian pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte seakan tidak memperdulikan adanya *Republic Act No. 9851* ini, hal ini buktikan dengan terimplementasikannya kebijakan *War On Drugs*. Dengan terimplementasikannya kebijakan ini tentunya menjadi sorotan bagi kelompok HAM di Filipina, selain itu kelompok dan aktivis HAM di Filipina sendiri juga menjadikan *Republic Act No. 9851* ini sebagai dasar dari kritik atas pelanggaran HAM yang terjadi atas kebijakan *War On Drugs* ini. Selain itu kekecewaan warga Filipina atas di implementasikannya kebijakan *War On Drugs* ini sendiri terlihat jelas dengan banyaknya demonstrasi yang terjadi⁶⁰.

2.2.1 Keluarnya Filipina dari ICC Court

Bergabungnya Filipina kedalam *International Criminal Court* sendiri merupakan buah dari satu dekade advokasi dan diskusi antara kelompok aktivis dan organisasi HAM di Filipina dan Internasional. Keputusan dari bergabungnya Filipina kedalam *International Criminal Court* sendiri merupakan titik balik setelah banyaknya pelanggaran HAM yang tidak di anggap serius atau bahkan tidak di tangani di masa lalu⁶¹. Benigno Aquino III juga ingin membalikan kebijakan pemerintahan presiden sebelumnya yakni presiden Arroyo yang dengan tegas menolak *International Criminal Court*. Aquino III juga menegaskan sekali lagi bahwa Filipina ingin menjadi salah satu

⁵⁹ Tony La Viña. *Op. Cit.*

⁶⁰ Jayson S. Lamchek and Teresa Jopson, "Confronting the Philippines' *War On Drugs*: A Literature Review," *Sociology Compass* 18, no. 5 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.1111/soc4.13209>.

⁶¹ *Ibid.*

bagian dari komunitas internasional yang melawan Impunitas⁶². Pada 30 Agustus tahun 2011 Filipina memutuskan untuk bergabung ke dalam *International Criminal Court*, pada saat itu Filipina sendiri di bawah kepemimpinan Benigno Aquino III berkomitmen untuk ikut berkontribusi ke dalam penegakan Hak Asasi Manusia serta Filipina berkomitmen untuk ikut andil kedalam peradilan Internasional hal ini di buktikan dengan di sahkanya *Republic Act No. 9851* yang di kenal juga sebagai *Philippine Act On Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity* yang di mana di sahkan 2 tahun sebelum meratifikasi Statuta Roma pada 2011⁶³. *Republic Act No. 9851* sendiri di rancang untuk menggabungkan antara prinsip prinsip hukum internasional dengan hukum domestik di Filipina, sehingga Filipina sendiri dapat mengadili pelanggar hukum internasional serta HAM secara mandiri atau dengan kata lain Filipina dapat bergerak untuk mengadili sendiri para pelanggar hukum internasional yang berada di Kawasan Filipina⁶⁴. Tujuan dari *Republic Act No. 9851* sendiri selain untuk menerapkan prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional di Filipina juga untuk memastikan bahwa individu yang terlibat kedalam kejahatan berat dapat di adili di Filipina tanpa harus bergantung kepada mekanisme Internasional dan tujuan utama dari *Republic Act No. 9851* yakni untuk memerangi Impunitas yang terjadi di Filipina dan memperkecil bahkan memblokir kemungkinan se

⁶² *Ibid.*

⁶³ Manila Standard Tony La Viña, "Duterte, Aquino, and the ICC," Manila Standard, 2021, <https://manilastandard.net/?p=358072>.

⁶⁴ Vera Files, "Crimes against Humanity through the Lens of Philippine Laws," Vera Files, 2021, <https://verafiles.org/articles/vera-files-fact-sheet-crimes-against-humanity-through-lens-p>.

kecil apapun dari pelaku kejahatan internasional untuk menghindar dari tanggung jawab atas kejahatan yang di lakukanya⁶⁵.

Pada masa kepemimpinan Benigno Aquino III *Republic Act No. 9851* menjadi landasan utama untuk bergabung atau meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2011 silam, kemudian Benigno Aquino III sendiri berulang kali mengatakan bahwa dengan di ratifikasinya *Republic Act No. 9851* menandai awal dari perlawanan terhadap Impunitas yang terjadi di Filipina sekaligus menjadi pelengkap atas peraturan domestik nasional di Filipina dalam menangani pelanggaran pelanggaran yang serius⁶⁶. Kemudian pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte seakan tidak memperdulikan adanya *Republic Act No. 9851* ini, hal ini buktikan dengan terimplementasikannya kebijakan *War On Drugs*. Dengan terimplementasikannya kebijakan ini tentunya menjadi sorotan bagi kelompok HAM di Filipina, selain itu kelompok dan aktivis HAM di Filipina sendiri juga menjadikan *Republic Act No. 9851* ini sebagai dasar dari kritik atas pelanggaran HAM yang terjadi atas kebijakan *War On Drugs* ini. Selain itu kekecewaan warga Filipina atas di implementasikannya kebijakan *War On Drugs* ini sendiri terlihat jelas dengan banyaknya demonstrasi yang terjadi⁶⁷.

Latar belakang keluarnya Filipina dari *International Criminal Court* (ICC) merupakan hasil dari serangkaian peristiwa dan keputusan politik yang kompleks. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Rodrigo Duterte pada 14 Maret 2018, yang mengejutkan masyarakat internasional. Duterte menyatakan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Tony La Viña. *Op. Cit.*

⁶⁷ Lamchek and Jopson, "Confronting the Philippines' *War On Drugs*: A Literature Review."

bahwa Filipina akan segera keluar dari ratifikasi Statuta Roma, meskipun proses keluarnya tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan waktu. Keputusan ini diambil setelah ICC memulai pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan dalam konteks "perang melawan narkoba" yang dipimpin oleh Duterte. Kebijakan ini, yang dikenal sebagai "*War On Drugs*," telah menyebabkan kematian sekitar 5.000 orang dalam setahun pertama pelaksanaannya, dan menimbulkan kecaman dari masyarakat internasional serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Seorang jaksa di Filipina, Jude Sabio, bahkan melaporkan tindakan ini ke ICC, menuduh Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Duterte, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan idiosinkratik dan ekspansionis, merasa bahwa tindakan ICC mengancam kedaulatan Filipina. Dia memiliki pandangan yang sangat nasionalis dan tidak ingin diganggu oleh pengaruh eksternal, termasuk dari ICC. Duterte juga menunjukkan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap yurisdiksi ICC, yang mempengaruhi keputusannya untuk menarik Filipina dari keanggotaan ICC. Meskipun Filipina secara resmi keluar dari ICC pada 17 Maret 2019, ICC tetap melanjutkan investigasi terhadap dugaan kejahatan yang terjadi selama Filipina masih menjadi anggota, sesuai dengan ketentuan Statuta Roma Pasal 127 ayat 2. Keputusan Duterte untuk keluar dari ICC juga menghadapi tantangan dari dalam negeri, termasuk dari *Philippine Coalition for the International Criminal Court* (PCICC), yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Keputusan Filipina untuk keluar dari ICC dipengaruhi oleh ketidakpuasan Duterte terhadap campur tangan ICC dalam urusan dalam negeri Filipina dan pandangan idiosinkratiknya yang menolak pengaruh eksternal terhadap kedaulatan negara. Keputusan ini juga mencerminkan perubahan dalam dinamika politik internasional Filipina, yang menjadi lebih berani dalam kebijakan luar negerinya di bawah kepemimpinan Duterte⁶⁸.

Duterte dikenal sebagai seorang pemimpin yang ekspansionis, yang berarti dia cenderung menempuh segala cara untuk mencapai tujuannya. Sikap ini tercermin dalam kebijakan "perang melawan narkoba" yang kontroversial, yang dilancarkan dengan maksud untuk menyelamatkan generasi muda Filipina. Kebijakan ini telah menyebabkan kematian ribuan orang dan menimbulkan kecaman internasional, termasuk dari ICC yang memulai pemeriksaan pendahuluan atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dalam konteks kebijakan tersebut. Duterte memiliki pandangan yang sangat nasionalis, yang berarti dia menolak campur tangan eksternal dalam urusan dalam negeri Filipina. Ketika ICC memulai pemeriksaan pendahuluan, Duterte merasa bahwa tindakan ICC mengancam kedaulatan negaranya. Dia menilai bahwa Filipina tidak menerapkan ketentuan ICC dalam undang-undang nasionalnya, dan oleh karena itu, dia merasa bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk campur tangan.

⁶⁸ Perkasa, "Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte Dalam Kebijakan Keluarnya Filipina Dari International Criminal Court (Icc)."

Sikap Duterte ini membuatnya mengambil langkah drastis untuk melindungi kebijakan dalam negerinya dari pengaruh eksternal. Dia mengancam untuk menarik Filipina dari ICC dan akhirnya mengumumkan keputusan tersebut pada Maret 2018.

Keputusan ini juga dipengaruhi oleh pandangan Duterte yang tidak bisa dipaksa dan diganggu, yang berarti dia tidak menerima tekanan dari pihak luar, termasuk dari lembaga internasional seperti ICC. Secara keseluruhan, faktor idiosinkratik Duterte, yang mencakup pandangan nasionalis, ekspansionis, dan ketidakmauan untuk menerima campur tangan eksternal, memainkan peran kunci dalam keputusan Filipina untuk keluar dari ICC. Keputusan ini mencerminkan ketidakpuasan Duterte terhadap campur tangan ICC dalam urusan dalam negeri Filipina dan pandangan idiosinkratiknya yang menolak pengaruh eksternal terhadap kedaulatan negara⁶⁹.

2.2.2 Dampak Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap Hubungan Uni Eropa

Hubungan yang terjalin antara Filipina dengan Uni Eropa sempat mengalami ketegangan semenjak Duterte resmi menjalankan kebijakan “*War On Drugs* “. Pada awal pelaksanaannya kebijakan tersebut tak langsung menjadi sorotan dunia namun dalam implementasinya dunia internasional mulai sadar bahwa kebijakan ini membawa pelanggaran HAM berat lantaran terjadi pembunuhan di luar proses

⁶⁹ *Ibid.*

hukum dan beberapa pelanggaran lainnya yang sontak memicu kritik keras dari Barat serta organisasi yang berjalan di bidang HAM⁷⁰.

Pada awalnya ketegangan antara Uni Eropa dan Filipina sendiri terjadi pada awal di lancarkanya kritik pada 15 September tahun 2016 silam, petinggi Eropa mendeklarasikan secara resmi untuk mendesak pemerintah Filipina untuk segera menyudahi salah satu penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan glombang eksekusi dan *Extrajudicial killing* terhadap warga sipil. Melalui parlemen Eropa juga menyerukan penyelidikan atas kasus-kasus tersebut. Pada dasar tujuannya Uni Eropa sendiri ingin menunjukkan keprihatinan dan kepeduliannya terkait HAM.

Keseriusan Uni Eropa dalam mengkritik kebijakan “*War On Drugs*” ini semakin ditunjukkan dengan melakukan pembatasan bantuan dan pelatihan pembangunan berkelanjutan untuk kepolisian Filipina melalui Program EPJUST I dan EPJUST II.

Presiden Duterte dikenal dengan sikapnya yang keras dan cenderung mengabaikan kritik internasional, termasuk dari negara-negara Barat. Ia menolak tuduhan pelanggaran HAM dan menganggap kritik tersebut sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Filipina. Sikap ini memperburuk hubungan Filipina dengan negara-negara Barat, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang selama ini menjadi mitra penting Filipina dalam berbagai bidang, termasuk keamanan dan Pembangunan

⁷⁰ Fransiska Pranjaya, “Peranan Human Rights Watch Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *UNIVERSITAS SEMARANG*, 2024.

Kendatipun Uni Eropa melayangkan kritik terhadap kebijakan “*War On Drugs* “, namun Uni Eropa juga secara nyata menjaga hubungan yang terjalin dengan Filipina. Hal ini di tunjukan dengan adanya kebijakan GoJustRang yang bertujuan untuk melakukan reformasi peradilan di Filipina. Selain itu duta besar untuk Filipina Franz Jessen menyatakan bahwa Uni Eropa akan memberikan bantuan yang bertujuan untuk mendanai rehabilitasi kepada korban pecandu narkoba di Filipina. dengan ini Uni Eropa menunjukkan adanya ruang kerja sama meskipun Duterte sama sekali tidak menggubris bantuan ini dan memberikan respon yang tidak begitu baik.

Akibatnya ketegangan yang muncul akibat kritik terhadap kebijakan Duterte berdampak pada hubungan Filipina dengan negara-negara Barat. Beberapa program kerja sama keamanan dan pelatihan dihentikan atau dibatasi, dan tekanan diplomatik meningkat. Namun, Filipina juga berusaha mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan negara Barat lainnya dengan melakukan restrukturisasi kebijakan luar negeri yang lebih mandiri

Hubungan Filipina dengan negara-negara Barat, khususnya Uni Eropa, mengalami ketegangan yang cukup tajam akibat kebijakan “*War On Drugs*” Presiden Duterte dan respon kerasnya terhadap kritik internasional. Uni Eropa dan negara Barat lainnya mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi dan mengambil langkah-langkah seperti pembatasan pelatihan kepolisian dan desakan penyelidikan internasional. Meskipun demikian, Uni Eropa tetap berupaya menjaga hubungan melalui program reformasi dan rehabilitasi. Sementara itu, Filipina berusaha mempertahankan kedaulatan kebijakan dalam negeri dan

mengurangi ketergantungan pada negara Barat, yang menandai dinamika kompleks dalam hubungan ini.

2.2.3 Respon Keras Duterte terhadap Uni Eropa

Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan sikap yang sangat tegas dan keras terhadap kritik yang dilayangkan oleh Uni Eropa terkait kebijakan "*War On Drugs*" yang diterapkannya di Filipina. Kebijakan ini mendapat kecaman internasional karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM)⁷¹, terutama terkait dengan praktik pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) yang terjadi selama pelaksanaannya. Duterte menolak keras segala bentuk campur tangan asing, termasuk dari Uni Eropa, dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kedaulatan nasional Filipina dan merupakan hak prerogatif pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam negerinya tanpa intervensi dari pihak luar⁷².

Ketegangan antara Filipina dan Uni Eropa mulai meningkat sejak kritik resmi dilayangkan oleh parlemen Eropa pada September 2016, yang menyerukan penyelidikan atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam kampanye anti-narkoba tersebut. Uni Eropa juga mengekspresikan keprihatinan mendalam terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan gelombang eksekusi yang terjadi, serta mendesak pemerintah Filipina untuk menghentikan tindakan tersebut. Sebagai respons, Duterte tidak hanya menolak kritik tersebut, tetapi juga mengabaikan tekanan internasional dan menolak melakukan penyelidikan eksternal atas tuduhan

⁷¹ Human Right Watch, "World Must Pressure Philippines on Drug War Accountability | Human Rights Watch," Human Rights Watch, 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/02/08/world-must-pressure-philippines-drug-war-accountability>.

⁷² *Ibid.*

pelanggaran HAM. Pemerintah Filipina, di bawah kepemimpinannya, menolak tuntutan akuntabilitas dari komunitas internasional dan organisasi HAM, termasuk penolakan terhadap laporan-laporan pelanggaran yang diajukan⁷³.

Sikap Duterte yang keras ini juga tercermin dalam penolakan terhadap bantuan dan program kerja sama yang diberikan oleh Uni Eropa. Sebagai bentuk tekanan diplomatik, Uni Eropa membatasi bantuan teknis dan pelatihan bagi aparat penegak hukum Filipina, terutama melalui program EPJUST I dan EPJUST II yang bertujuan mendukung reformasi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum berbasis HAM. Namun, Duterte tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan "*War On Drugs*" tanpa kompromi, bahkan menyatakan bahwa Filipina tidak membutuhkan bantuan Uni Eropa jika syaratnya adalah menghentikan kampanye anti-narkoba tersebut⁷⁴.

Meskipun demikian, Uni Eropa tetap berusaha menjaga hubungan dengan Filipina melalui program-program lain, seperti bantuan untuk rehabilitasi korban pecandu narkoba dan reformasi peradilan. Namun, upaya ini kurang mendapat respons positif dari Duterte, yang cenderung mengabaikan atau merespons secara negatif bantuan tersebut. Hal ini menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan dalam hubungan antara Filipina dan Uni Eropa.⁷⁵

Sikap Duterte yang keras dan penolakannya terhadap kritik internasional menimbulkan ketegangan diplomatik yang signifikan antara Filipina dan Uni Eropa. Konflik ini mencerminkan benturan antara prinsip kedaulatan nasional dan

⁷³ Pranjaya, "Peranan Human Rights Watch Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia." Hal 66-67

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid. Hal 74-75*

tekanan internasional terkait isu HAM, di mana Duterte menegaskan bahwa kebijakan dalam negerinya adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak luar.

2.2.4 Kondisi Hubungan Filipina dan Uni Eropa

Sebelum ketegangan yang signifikan muncul, hubungan antara Filipina dan Uni Eropa berjalan dalam jalur yang positif dan konstruktif. Kedua pihak fokus pada kerja sama pembangunan dan reformasi hukum, terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Uni Eropa berperan sebagai mitra strategis Filipina dengan memberikan dukungan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum, seperti Kepolisian Nasional Filipina. Contohnya adalah program EPJUST I dan EPJUST II yang bertujuan untuk melatih aparat penegak hukum dan mereformasi sistem peradilan pidana di Filipina. Program-program ini menunjukkan komitmen Uni Eropa dalam membantu Filipina mengatasi masalah narkoba dan kriminalitas dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum⁷⁶.

Secara umum, hubungan ini didasarkan pada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan, di mana Uni Eropa memberikan bantuan pembangunan dan Filipina berupaya melakukan reformasi hukum yang sesuai dengan standar internasional. Hubungan ini juga mencerminkan kepercayaan dan harapan bahwa Filipina dapat mengelola masalah internalnya secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai HAM. Oleh karena itu, sebelum ketegangan muncul, hubungan

⁷⁶ *Ibid.* Hal 68-69

Filipina-Uni Eropa relatif stabil dan positif, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan reformasi sistem hukum⁷⁷.

Ketegangan antara Filipina dan Uni Eropa mulai meningkat secara signifikan ketika Presiden Rodrigo Duterte menerapkan kebijakan "*War On Drugs*" secara agresif. Kampanye pemberantasan narkoba ini menimbulkan gelombang eksekusi dan pembunuhan di luar proses hukum yang sah, yang kemudian memicu kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Pada 15 September 2016, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi resmi yang mendesak pemerintah Filipina untuk mengakhiri praktik eksekusi di luar proses hukum dan melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam kampanye tersebut. Resolusi ini menuntut Filipina menghormati standar HAM internasional dan memastikan akuntabilitas bagi pelaku pelanggaran.

Sebagai respons atas pelanggaran HAM yang dilaporkan, Uni Eropa mengambil langkah konkret dengan menanggihkan sebagian program pelatihan dan pengembangan untuk Kepolisian Nasional Filipina melalui program EPJUST. Penanggihan ini merupakan bentuk protes dan tekanan diplomatik agar Filipina menghentikan praktik-praktik yang melanggar HAM. Selain itu, berbagai organisasi HAM internasional seperti Amnesty International juga mengkritik pemerintah Filipina atas respon yang dianggap tidak memadai terhadap korban pelanggaran HAM dalam kampanye "*War On Drugs*"⁷⁸.

⁷⁷ Pranjaya. *Op. Cit.* Hal 73-74

⁷⁸ Berlianto, "Kritik Duterte, Filipina Deportasi Pejabat Partai Sosialis UE," SINDONEWS.COM, 2018, <https://international.sindonews.com/berita/1298133/40/kritik-duterte-filipina-deportasi-pejabat-partai-sosialis-ue?>

Ketegangan semakin memuncak ketika Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memulai penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam kampanye tersebut antara tahun 2011 hingga 2019. Filipina mengajukan permintaan penangguhan penyelidikan⁷⁹, namun ICC menolak dan melanjutkan proses penyelidikan. Hal ini menambah ketegangan diplomatik antara Filipina dan Uni Eropa serta komunitas internasional secara umum. Pemerintah Filipina juga mengajukan keberatan terhadap penyelidikan ICC, yang semakin memperkeruh hubungan.

Selain itu, jaringan advokasi transnasional (*Transnational Advocacy Networks/TANs*) yang melibatkan organisasi HAM internasional dan aktor dari berbagai negara memainkan peran penting dalam mengekspos pelanggaran HAM di Filipina. Jaringan ini menggunakan berbagai taktik seperti leverage politics dan accountability politics untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Filipina melalui kampanye simbolik dan tekanan politik, mendorong perubahan kebijakan dan akuntabilitas pemerintah.

Setelah periode ketegangan yang cukup tajam, terdapat upaya dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Uni Eropa, meskipun tetap mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi, mulai menyesuaikan pendekatannya dengan fokus pada dukungan reformasi peradilan dan aspek kemanusiaan yang lebih luas⁸⁰. Uni Eropa tetap menjadi mitra penting bagi Filipina dalam hal pembangunan dan reformasi

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

hukum, namun dengan catatan bahwa penghormatan terhadap HAM harus menjadi bagian integral dari kerja sama tersebut.

Di sisi lain Filipina berusaha mengelola tekanan internasional dengan mempertahankan kebijakan domestiknya yang dianggap penting untuk keamanan dan stabilitas nasional. Pemerintah Filipina menegaskan bahwa kebijakan "*War On Drugs*" adalah bagian dari upaya serius untuk memberantas kejahatan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif narkoba. Namun, pemerintah juga menunjukkan kesediaan untuk melakukan reformasi dan dialog dengan mitra internasional, termasuk Uni Eropa, dalam rangka memperbaiki aspek-aspek yang menjadi sorotan⁸¹.

Respons keras Rodrigo Duterte terhadap kritik Uni Eropa seperti gestur mengacungkan jari tengah, bahasa kasar, dan ultimatum agar diplomat UE segera meninggalkan Filipina dalam 24 jam lebih mencerminkan gaya kepemimpinan pribadi yang agresif dan sangat berbeda dengan cita-cita strategis nasional Filipina. Tindakan tersebut bukanlah produk dari kebijakan diplomatik resmi bahkan Kementerian Luar Negeri dan diplomat Filipina menanggapi kritik UE dengan nada yang lebih diplomatis dan profesional, menuduh kritik itu "*biased*" atau "*incomplete*" tanpa melakukan gestur ekstrem. Pidato provokatif Duterte pada Oktober 2017 menegaskan bahwa gestur dan retorikanya bersifat personalistik. Ia secara terbuka menyebut kritik asing sebagai bentuk intervensi, mengancam akan putus saluran diplomatik, dan mengeklaim bahwa UE ingin

⁸¹ Khairisa Ferida, "Presiden Duterte Ancam Usir Seluruh Dubes Uni Eropa - Global Liputan6.Com," Liputan 6, 2017, <https://www.liputan6.com/global/read/3127131/presiden-duterte-ancam-usir-seluruh-dubes-uni-eropa?>

mengusir Filipina dari PBB klaim yang tidak didukung fakta . Bahkan pejabat Istana kemudian mengakui bahwa gestur itu adalah ‘ekspresi kemarahan’ bukan kebijakan resmi⁸².

Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa aparat negara tetap memprioritaskan jalur diplomasi formal. Misalnya, saat menolak bantuan UE senilai ratusan juta euro pada Mei 2017, keputusan tersebut diambil secara kebijakan dan dijelaskan sebagai bantahan terhadap intervensi yang dipandang tidak sesuai persyaratan, bukan ekspresi amarah personal. Gestur dan retorika ekstrem Duterte lebih merupakan manifestasi dari gaya personalnya yang di kombinasikan dengan emosional, simbolik, dan provokatif, Perangkat formal pemerintahan Filipina dan diplomat resmi tetap menjalankan diplomasi standar, tanpa meniru tindakan agresif sang presiden⁸³.

⁸² BBC News, “In Fiery Attack, Philippines’ Duterte Accuses EU of Plotting,” BBC News, 2017, https://www.bbc.com/news/world-asia-41600434?utm_source.

⁸³ ABC News, “Philippines’ Duterte Gives Middle Finger to European Union after Criticism of Drug War,” ABC News World Politics, 2016, https://www.abc.net.au/news/2016-09-21/philippines-duterte-gives-middle-finger-to-eu/7866288?utm_source.